



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021



Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKjIP BAPPEDA) Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Bupati Sumenep sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. Berbagai upaya untuk dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam perencanaan pembangunan, dijabarkan dalam laporan kinerja ini, yang sekaligus dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD 2016-2021.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, Januari 2021



KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP

Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Hasil ringkasan pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang dihasilkan di tahun 2020, dapat disimpulkan capaian kinerja di atas **98,26%** dari target yang ditetapkan dengan atribut capaian **Sangat Berhasil**, sebagai berikut:

Tabel Ikhtisar
Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja	96,08%	Sangat Baik
		Bobot Pengukuran Kinerja	91,72%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	100%	Sangat Baik
		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	100%	Sangat Baik





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria
		Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	100%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	100%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	100%	Sangat Baik

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Sumenep ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep dalam memperbaiki kinerja di tahun yang akan datang.





Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Fungsi dan Tugas	3
1.4 Isu-Isu Strategis	4
1.5 Keadaan Pegawai.....	5
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	8
1.7 Keuangan	12
1.8 Sistematika Penyusunan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.1.3. Strategi dan arah Kebijakan	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020	24
2.4. Instrumen Pendukung.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1. Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2020	27
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya ..	28
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	28
3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran	40





BAB IV PENUTUP45

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. Lain-lain





BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumenep
2. Mendorong Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.





- Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2

Struktur Organisasi

Bappeda Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumenep



**1.3****Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, menetapkan bahwa Bappeda Kabupaten Sumenep mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
4. Pelaksanaan pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
5. Pelaksanaan pengoordinasian penelitian dan pengembangan;
6. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bappeda Kabupaten Sumenep senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi





para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.4**Isu-isu Strategis**

Posisi strategis Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh aspek perencanaan pembangunan yang memadai untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja pelaksanaan program yang didanai dari APBD;
2. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program - program kerja Pemerintah Kabupaten;
3. Kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya implementasi kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga memunculkan deviasi antara usulan dengan penetapannya;
4. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan Peraturan Perundang - undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan



pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada Perundang - undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep;

5. Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033 yang merupakan pedoman Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan penataan ruang. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala baik dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dilapangan, oleh karena itu kerja sama dengan masyarakat maupun stakeholder dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu ditingkatkan.

1.5

Keadaan Pegawai

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah Pegawai di BAPPEDA Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan per 30 Desember 2020 sebanyak 52 orang, dengan rincian sebagai berikut :





Tabel 1.5.1 Daftar Kepegawaian Menurut Jabatan
Bappeda Kabupaten Sumenep Th. 2020

No.	Nama Jabatan Struktural	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	Kepala OPD	1	
2	Sekretaris	1	
3	Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian	1	
4	Sub Bagian Program	1	
5	Sub Bagian Keuangan	1	
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	
7	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	1	
8	Sub Bidang Pengendalian Pembangunan	1	
9	Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	1	
10	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	
11	Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	1	
12	Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1	
13	Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1	
14	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	
15	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	1	
16	Sub Bidang Sumber Daya Alam	1	
17	Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi	1	
18	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	
19	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1	
20	Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah	1	
21	Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan	1	
22	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	
23	Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan	1	
24	Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	1	
TOTAL		24	





Tabel 1.5.2 Jumlah Ideal Kepegawaian Berdasarkan Eselon
Bappeda Kabupaten Sumenep Th. 2020

JABATAN	JUMLAH SEKARANG	JUMLAH IDEAL/KEBUTUHAN	KEKURANGAN
Eselon II	1	1	0
Eselon III	6	6	0
Eselon IV	16	17	1
JFT	3	3	0
Pelaksana	26	60	34
Jumlah	52	87	35

Gambar 1.5.1 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon
Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020



Dengan jumlah pegawai yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab BAPPEDA Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

1.6

Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-





masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep terletak di Jalan Trunojoyo nomor 120 diatas tanah seluas 1.400 M², dengan bangunan 2 (dua) lantai seluas 800 M². Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan perlu ditingkatkan sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep telah tersedia sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020

No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang	Keterangan/ Kondisi
1	Mobil Suzuki Carry	Unit	6	Baik
2	Mobil Kijang kf. 50 Sp	Unit	1	Baik
3	Mobil Kijang Innova	Unit	1	Baik
4	Mobil Suzuki Ertiga	Unit	3	Baik
5	Mobil Suzuki Avansa	Unit	1	Baik
6	Sepeda Motor	Unit	47	Baik
7	Bangunan Kantor	Unit	1	Baik
8	AC	BH	34	Baik
9	Alat Pemadam Kebakaran	BH	6	Baik
10	Brankas	BH	6	Baik
11	Dispencer	BH	3	Baik
12	Filing Cabinet	BH	13	Baik
13	Lemari Besi / Metal	BH	1	Baik
14	Lemari Kaca	BH	2	Baik





No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang	Keterangan/ Kondisi
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	BH	3	Baik
16	Mesin Ketik Manual Standard	BH	2	Baik
17	Panggung	BH	1	Baik
18	Papan Informasi/Pengumuman	BH	5	Baik
19	Rak Buku	BH	7	Baik
20	Kursi Pimpinan	BH	2	Baik
21	Kursi Eselon III	BH	9	Baik
22	Kursi Eselon IV	BH	14	Baik
23	Kursi Kerja	BH	92	Baik
24	Kursi Tamu	BH	1	Baik
25	Lemari Kayu	BH	9	Baik
26	Kursi Tamu	BH	4	Baik
27	Lemari Kayu	BH	8	Baik
28	Meja Kerja Pimpinan	BH	3	Baik
29	Meja Eselon III	BH	1	Baik
30	Meja Eselon IV	BH	1	Baik
31	Meja Kerja	BH	20	Baik
32	Meja Rapat	BH	15	Baik
33	CPU	BH	2	Baik
34	Komputer PC	BH	64	Baik
35	Monitor	BH	3	Baik
36	Scanner	BH	5	Baik
37	Note Book	BH	11	Baik
38	Printer	BH	49	Baik
39	Televisi	BH	9	Baik
40	Mesin Foto Copy	BH	1	Baik
41	Vacuum Cleaner Wet and Dry	BH	1	Baik





No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang	Keterangan/ Kondisi
42	Laptop	BH	2	Baik
43	Speaker Simbadda	BH	2	Baik
44	Meja Kerja Pimpinan	BH	3	Baik
45	Meja Kursi Tamu	BH	3	Baik
46	Kain Horden Maljino Warna Hijau Tosca	Meter	333	Baik
47	Mesin Penghancur Kertas	BH	5	Baik
48	Meja Pimpinan Rapat	BH	2	Baik
49	Meja Peserta Rapat	BH	24	Baik
50	Kursi Pimpinan Rapat	BH	8	Baik
51	Kursi Peserta Rapat	BH	80	Baik
52	Mesin Ketik (Olimpia 18")	BH	2	Baik
53	Kalkulator	BH	2	Baik
54	Kulkas	BH	3	Baik
55	Teralis Besi (Uk. 15,74 x 22,52 m)	BH	1	Baik
56	Kursi Kerja Pimpinan	BH	3	Baik
57	UPS	BH	17	Baik
58	Faximile	BH	3	Baik
59	Camera Digital	BH	4	Baik
60	Camera	BH	9	Baik
61	Handycam	BH	5	Baik
62	LCD Proyektor	BH	1	Baik
63	Wireless	BH	1	Baik
64	Radio Tape/ VCD	BH	1	Baik
65	Sound System	BH	11	Baik
66	Overhead Proyektor	BH	25	Baik
67	Layar Overhead Projector	BH	25	Baik
68	Layar Proyektor	BH	1	Baik





No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang	Keterangan/ Kondisi
69	CCTV	BH	1	Baik
70	Proyektor	BH	1	Baik
71	UPS Stabilizer	BH	1	Baik
72	Tabung Pemadam Kebakaran	BH	4	Baik
73	Server/Mainframe	BH	1	Baik
74	Jaringan Komputer	BH	1	Baik
75	Instalasi Listrik	BH	1	Baik
76	Mikrofon	BH	1	Baik
77	Mesin Tik	BH	7	Baik
78	Waste BIN BLK Ek9425/GPX-25(Asbak)	BH	8	Baik
79	Almari Besi	BH	1	Baik
80	Kartu / Mesin Absensi	BH	1	Baik
81	Kotak Pengaduan	BH	1	Baik
82	Telephone (Pabx)	BH	1	Baik
83	Server Komputer	BH	1	Baik
84	Server Rackmount	BH	2	Baik
85	PC	BH	23	Baik
86	Hardisk Eksternal	BH	7	Baik
87	Hardisk Server	BH	1	Baik
88	Lampu Hias	BH	1	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.



**1.7****Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Sumenep. Pada Tahun Anggaran 2020 Bappeda Kabupaten Sumenep mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11.602.218.220,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 6.530.403.056,- dan belanja langsung sebesar Rp 5.071.815.164 ,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 5.752.751.776,- yang didukung oleh 10 program dan 36 kegiatan.

1.8**Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN





BAB II

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2011-2015).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Sumenep yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi





kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan Visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”





Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

2. Misi

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.

Misi Kedua, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

Misi Keempat, Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

Misi Kelima, Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

Misi Keenam, Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.





Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel : 2.3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016 - 2021

Visi: Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
					Angka Harapan Lama Sekolah
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
				Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
					Persentase Penurunan Masalah Sosial
2	Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan	Indeks kualitas layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
					Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
					Indeks Kinerja Irigasi
					Persentase aksesibilitas wilayah kepulauan dan daratan
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman/ perumahan secara memadai	Persentase rumah sehat
					Rasio Elektrifikasi
					Indeks kualitas air sungai
					Indeks kualitas udara
					Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi



Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
3 Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani
				Nilai Tukar Nelayan
			Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura
				Jumlah Produksi Hasil Perkebunan
				Jumlah Produksi Hasil Peternakan
				Jumlah Produksi Hasil perikanan
			Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
			Meningkatnya daya saing sektor Industri dan Perdagangan	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah
				Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan
				Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian
			Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat
				Persentase pertumbuhan UMKM
			Meningkatnya daya tarik pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan
				Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Meningkatnya daya tarik investasi	Jumlah investor			
	Jumlah nilai investasi			
Meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah	Persentase PAD terhadap APBD			
4 Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai SKM	Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda	Nilai SAKIP
				Opini BPK
				Peringkat LPPD
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik
				E-Government / Indeks SPBE





Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
5 Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan	Meningkatkan kemandirian masyarakat desa	Indeks Desa membangun	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial	Persentase BUMDes yang sehat
				Persentase desa mandiri
	Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat	Indeks keamanan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS)
				Indeks Pemberdayaan Gender
		Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Kabupaten Layak Anak	
6 Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme dan kearifan lokal	Indeks Toleransi	Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama	Persentase penurunan konflik sosial
			Meningkatnya Pelestarian Nilai-nilai seni dan budaya	Indeks Pelestarian seni dan budaya

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Bappeda Kabupaten Sumenep berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: meningkatnya pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan indikator capaian sasaran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.





Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Tujuan Dan Sasaran Yang Ditetapkan Untuk Mencapai
Visi Dan Misi Bupati Sumenep

Tujuan		Sasaran Strategis	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda	Nilai SAKIP Peringkat LPPD	Terwujudnya Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja
			Bobot Pengukuran Kinerja
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
			Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik
			Persentase OPD dengan Capaian Program Baik
		Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Hasil Survey Kepuasan Aparatur		

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, melalui strategi meningkatkan integrasi dan sinergitas dokumen perencanaan dengan Arah Kebijakan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif;





- b. Sasaran meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan melalui strategi melakukan kajian, penelitian dan pengembangan inovatif yang ditindaklanjuti dengan pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh OPD;
- c. Sasaran meningkatnya sarana layanan perkantoran melalui strategi membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan aearh kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Tabel : 2.1.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Perlunya penyusunan dokumen perencanaan dan kajian pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu didukung dengan data yang cukup handal serta serta didukung peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;	Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan integrasi dan sinergitas dokumen perencanaan dengan Arah Kebijakan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif
		Meningkatnya kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan inovatif yang ditindaklanjuti dengan pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh OPD	Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang inovatif



Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan aearh kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda	Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda

Rencana Strategis Kabupaten Sumenep pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021, maupun dalam Kebijakan Strategis di Kabupaten Sumenep menetapkan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.





Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Bidang Pembangunan. Reformasi tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

2.2**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang telah disusun, maka Bappeda Kabupaten Sumenep telah menyusun Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja	Bobot 25,52
	Bobot Pengukuran Kinerja	Bobot 18
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	65%
	Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	80%
	Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	80%
Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	50%



**2.3****Rencana Anggaran Tahun 2020**

Pada Tahun Anggaran 2020 Bappeda Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 11.602.218.220,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.530.403.056,- dan Belanja Langsung Rp 5.071.815.164,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi sebesar Rp 11.330.981.865,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.061.752.589,- dan Belanja Langsung Rp 5.269.229.276,-

2.4**Instrumen Pendukung**

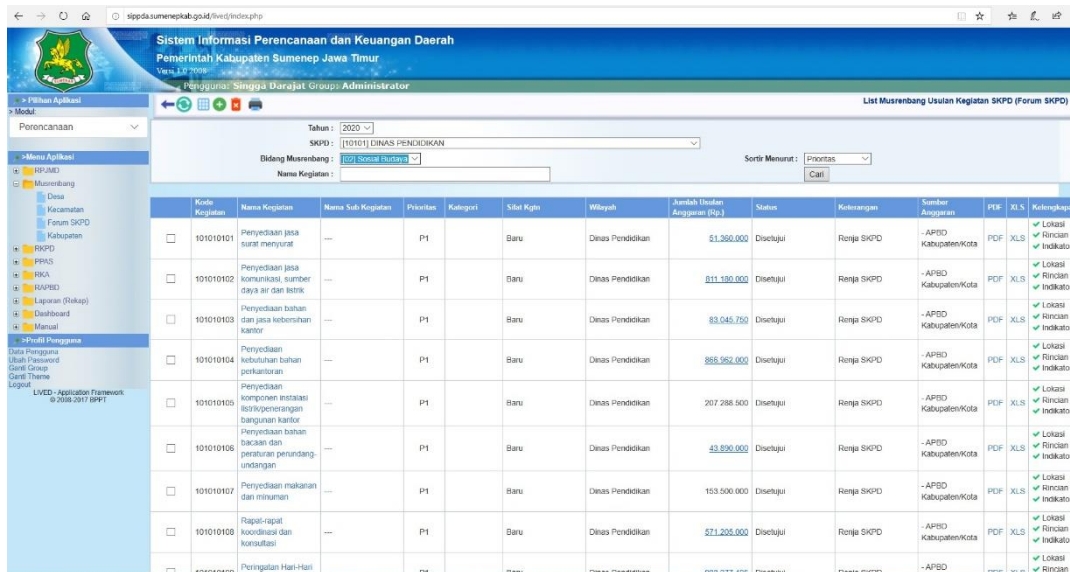
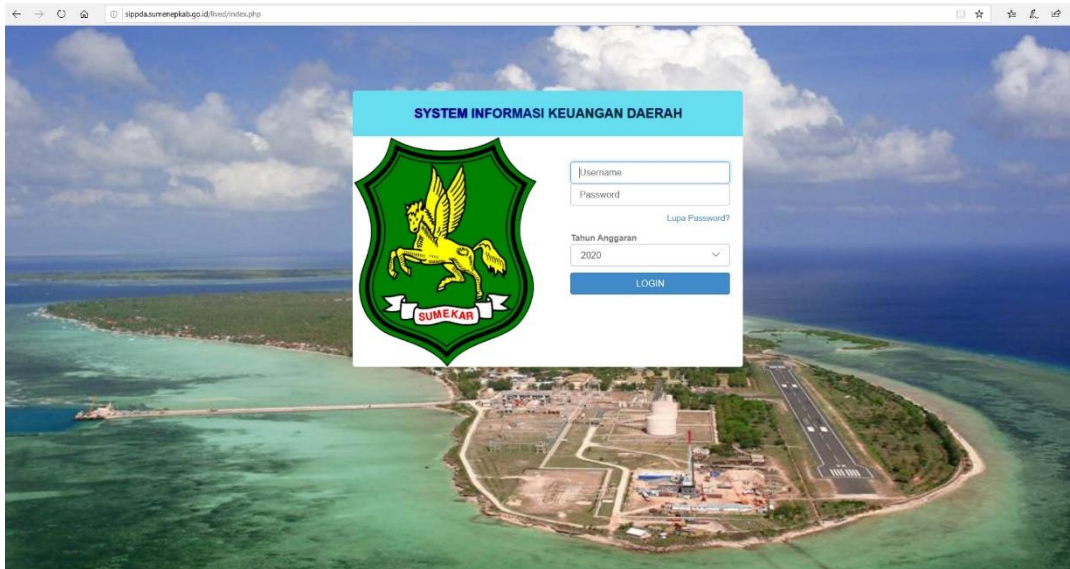
Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu menyelenggarakan dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum. Untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Sumenep. Bappeda Kabupaten Sumenep tindakan kedepan untuk menampung segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) (<http://sippda.sumenepkab.go.id>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Pengembangan aplikasi Simral memberikan sumbangan terhadap kualitas perencanaan pembangunan





yang cukup signifikan dari tahun ke-tahun yang selalu mengalami peningkatan.



Gambar 2.4. Aplikasi Perencanaan (sippda.sumenepkab)



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1

Capaian Kinerja Organisasi

Dalam implementasi Sistem AKIP di Bappeda Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Bappeda Kabupaten Sumenep pelaksanaan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian kinerja ini dilakukan tim evaluasi internal untuk mengukur pengumpulan data kinerja hasilnya dapat memberikan gambaran pengawasan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah





Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	65	65	100
		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	80	80	100
		Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	%	80	80	100
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	100

Tabel 3.1.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja	bobot	25,52	24,52	96,08
		Bobot Pengukuran Kinerja	bobot	18	16,51	91,72





2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	-	60	65
		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	-	75	80
		Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	%	-	75	80
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	50

Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
1.	Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja	bobot	19,91	22,65	24,52
		Bobot Pengukuran Kinerja	bobot	17,58	17,44	16,51

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :





Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2020
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	65	70	65
		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	80	85	80
		Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	%	80	85	80
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	50

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR TUJUAN RENSTRA s/d TAHUN 2020
1.	Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja	bobot	24,52	26,5	25,52
		Bobot Pengukuran Kinerja	bobot	16,51	19	18

4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut:





Tabel 3.4.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasarann
Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	65	65	100	1.013.373.100	941.774.459	92,93	7,07
		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	80	80	100	2.354.485.900	2.229.444.689	94,69	5,31
		Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	%	80	80	100	136.465.000	127.465.579	93,41	6,59
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	100	327.034.664	310.487.664	94,94	5,06
3.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	%	85	85	100	1.240.456.500	1.140.229.624	91,92	8,08

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.1
Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
I.	Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	65%	65%	100%





NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
I.1.	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS	80%	80%	100%
I.1.1.	Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Kecamatan Pengusul Kegiatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100%
		Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 sistem	1 sistem	100%
I.1.2.	Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah laporan terverifikasi kegiatannya sesuai prioritas daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
I.1.3.	Kegiatan : Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
II.		Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	80%	80%	100%
II.1.	Program : Pengembangan data/informasi dan Pelaporan	Persentase penyelesaian Dokumen / Laporan tepat waktu	100%	100%	100%
II.1.1.	Kegiatan : Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan DAK disusun tepat waktu	4 laporan	4 laporan	100%
		Jumlah laporan pembangunan daerah disusun tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100%
		Jumlah dokumen Hibah dan Bantuan Sosial disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%
II.1.2.	Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa Data Hasil Pembangunan Daerah (SIPD) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%





NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
		Jumlah laporan Rencana Aksi Daerah disusun tepat waktu	3 laporan	3 laporan	100%
III.		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	80%	80%	100%
III.1.	Program : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan bidang Sosial Budaya yang diimplementasikan	100%	100%	100%
III.1.1.	Kegiatan : Perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan	Jumlah dokumen kependudukan dan pemerintahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.1.2.	Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah laporan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
III.1.3.	Kegiatan : Perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen kesehatan dan kesejahteraan sosial yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.2.	Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi bidang perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	100%	100%
III.2.1.	Kegiatan : Perencanaan pembangunan industri perdagangan dan koperasi	Jumlah laporan Perencanaan Indag dan Koperasi yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Dokumen Analisis Alternatif Pendanaan Non APBD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.2.2.	Kegiatan : Pendampingan Anti Poverty Program (APP)	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	1 Pokmas	1 Pokmas	100%
III.2.3.	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%





NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
		Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
III.2.4.	Kegiatan : Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanian, Perikanan dan SDA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
III.3.	Program : Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan bidang sarana dan prasarana yang diimplementasikan	100%	100%	100%
III.3.1.	Kegiatan : Perencanaan pembangunan PU dan Perhubungan	Jumlah Laporan Kegiatan perencanaan Pembangunan PU dan Perhubungan yang di susun	1 laporan	1 laporan	100%
III.3.2.	Kegiatan : Perencanaan pembangunan PRKP dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen Review RAD-AMPL yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Perbup RP2KPKP dan Kajian Kawasan Kumuh yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Review SSK yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Identifikasi dan Penataan Kawasan Permukiman wilayah Pesisir yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%





NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
		Jumlah Dokumen Aset PSU Perumahan dan PSU Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kalianget yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
III.3.3.	Kegiatan : Perencanaan Tata Ruang dan LH	Jumlah Dokumen Perda Review RTRW Kabupaten Sumenep yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Kajian Perencanaan Kota Baru yang disusun	1 Kajian	1 Kajian	100%
		Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
III.4.	Program : Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan wilayah kepulauan yang diimplementasikan	100%	100%	100%
III.4.1.	Kegiatan : Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan	Jumlah Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Sarana Infrastruktur Air bersih kepulauan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
III.4.2.	Kegiatan : Penyusunan profil wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep	Jumlah Profil Wilayah Kepulauan yang disusun	1 Profil Kepulauan	1 Profil Kepulauan	100%
IV.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	50%	50%	100%
IV.1.	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
IV.1.1.	Kegiatan : Penyusunan penelitian Daerah	Jumlah Laporan Kajian, Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang disusun	2 kajian	2 kajian	100%
		Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi hasil-hasil kajian yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Laporan Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah laporan kajian, pengembangan potensi unggulan daerah berbasis IPTEK yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah laporan Inovasi Teknologi (Inotek) yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kajian yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja yang pertama Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) didukung oleh :

1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya konsistensi pengumpulan data masing-masing program/kegiatan SKPD antara dokumen PPAS dan dokumen RKPD dengan baik disusun tepat waktu.

Keberhasilan ini ditunjang dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

a. Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD

- Sub Kegiatan : Pengembangan SIMRAL





- *Sub Kegiatan : Penyusunan RKPD*
- *Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang RKPD*
- b. **Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS**
 - *Sub Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS*
 - *Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pokja Verifikasi Kegiatan*
 - *Sub Kegiatan : Penyusunan RPJMD*

Indikator yang kedua Persentase OPD dengan Capaian Program Baik didukung oleh :

1.2. Program Pengembangan data/informasi dan Pelaporan

Program ini sangat berhubungan dengan pemenuhan data capaian laporan kinerja pembangunan maupun anggaran. Output yang dihasilkan berupa dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep tahun 2020, laporan evaluasi kinerja pembangunan per triwulan, laporan realisasi DAK, serta laporan realisasi bantuan hibah dan bansos disusun tepat waktu.

Keberhasilan ini ditunjang dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

- a. **Kegiatan : Pengendalian Pembangunan Daerah**
 - *Sub Kegiatan : Sinkronisasi dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial*
 - *Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan DAK*
 - *Sub Kegiatan : Pengendalian Pembangunan Daerah*
- b. **Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**
 - *Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah*
 - *Sub Kegiatan : Analisa Data Hasil Pembangunan Daerah (SIPD)*
 - *Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban*

Indikator yang ketiga Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik didukung oleh :





1.3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Meningkatnya pengumpulan data masing-masing SKPD dalam penyusunan RKPD bidang pemeritahan dan pembangunan manusia, dan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia. Keberhasilan ini ditunjang dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

- a. Kegiatan : Perencanaan pembangunan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan
- b. Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)
- c. Kegiatan : Perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan social
- d. Kegiatan : Perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan

1.4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Meningkatnya pengumpulan data masing-masing SKPD dalam penyusunan RKPD bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, dan kualitas perancangan yang baik program dan kegiatan OPD terkait Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Keberhasilan ini ditunjang dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

- a. Kegiatan : Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan SDA
- b. Kegiatan : Perencanaan pembangunan industri perdagangan dan koperasi

- *Sub Kegiatan : Analisis Alternatif Pendanaan Non APBD*





- *Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri
Perdagangan dan Koperasi*

c. Kegiatan : Pendampingan Anti Poverty Program (APP)

d. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam

- *Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam*

- *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Corporate Social Responsibility (CSR)*

1.5. Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah

Meningkatnya dokumen kualitas perencanaan bidang sarana dan prasarana yang dapat diimplementasikan dari program kegiatan sektor sanitasi, air minum, prasarana sarana perumahan, dan pendampingan Review RTRW Tahun 2013-2033 pemanfaatan ruang yang terarah.

Keberhasilan ini ditunjang dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

a. Kegiatan : Perencanaan pembangunan PU dan Perhubungan

b. Kegiatan : Perencanaan pembangunan PRKP dan Cipta Karya

- *Sub kegiatan : Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)*

- *Sub kegiatan : Koordinasi Perencanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)*

- *Sub kegiatan : Koordinasi Perencanaan Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)*

- *Sub kegiatan : Identifikasi dan Penataan Kawasan Permukiman
Wilayah Pesisir*

- *Sub kegiatan : Identifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Kabupaten Sumenep*

- *Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
dan Sub kegiatan : Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (RP3KP)*

c. Kegiatan : Perencanaan Tata Ruang dan LH





- *Sub kegiatan : Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup*
- *Sub kegiatan : Penyusunan Perda Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*
- *Sub kegiatan : Kajian Perencanaan Kota Baru Kecamatan Batuan*

1.6. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan

Meningkatnya dokumen kualitas perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dapat diimplementasikan dapat tersedia Infrastruktur Air Bersih Pulau sapudi secara efisiensi dan pelayanan air minum di pulau sapudi, dan serta penyediaan informasi kebutuhan air minum sampai 5 (lima) tahun mendatang. Keberhasilan ini ditunjang dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

- a. Kegiatan : Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan
 - *Sub kegiatan : Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Sarana Infrastruktur Air Bersih Wilayah Kepulauan Kabupaten*
- b. Kegiatan : Penyusunan profil wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep
 - *Sub kegiatan : Penyusunan Profil Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep*

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan didukung oleh :

2.1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna mewujudkan





kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan dari kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Indeks Inovasi Daerah ini adalah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah. Ditahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) 674 dan tahun 2020 berhasil meraih mendapatkan penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri R.I. dengan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) menjadi 7,654. Keberhasilan ini ditunjang dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

- a. Kegiatan : Penyusunan penelitian Daerah
 - *Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi (Inotek) Kabupaten Sumenep*
 - *Sub kegiatan : Pengkajian, Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Dengan Berbasis IPTEK*
 - *Sub kegiatan : Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)*
- b. Kegiatan : Pengembangan Penelitian Daerah
 - *Sub kegiatan : Pengkajian, Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*
 - *Sub kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Hasil-hasil Kajian*
 - *Sub kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kajian*

3.2**Realisasi Anggaran**

Realisasi anggara program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2020. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut :





Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
I.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.158.360.500	1.059.068.124	-99.292.376	91,43
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	34.286.000	31.031.500	-3.254.500	90,51
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	204.000.000	175.258.300	-28.741.700	85,91
3.	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	38.011.000	37.942.000	-69.000	99,82
4.	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	21.090.500	21.009.000	-81.500	99,61
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	7.995.000	-5.000	99,94
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	54.200.000	50.538.000	-3.662.000	93,24
7.	Penyediaan makanan dan minuman	17.568.000	17.561.000	-7.000	99,96
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	160.635.000	110.575.219	-50.059.781	68,84
9.	Peringatan Hari-Hari Besar	6.220.000	6.220.000	0	100,00
10.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	411.340.000	401.278.645	-10.061.355	97,55
11.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	84.750.000	84.484.000	-266.000	99,69
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96.160.000	93.650.460	-2.509.540	97,39
13.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	22.100.000	21.525.000	-575.000	97,40
II	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	55.525.000	55.200.000	-325.000	99,41
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	10.425.000	10.100.000	-325.000	96,88
2.	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	45.100.000	45.100.000	0	100,00
III	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.571.000	25.961.500	-609.500	97,71
1.	Penyusunan Laporan Keuangan	16.000.000	15.996.000	-4.000	99,98
1.1.	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
1.2.	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</i>	<i>8.000.000</i>	<i>7.996.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>99,95</i>





NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.571.000	9.965.500	-605.500	94,27
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.013.373.100	941.774.459	-71.598.641	92,93
1.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	421.509.600	409.584.409	-11.925.191	97,17
1.1.	<i>Pengembangan SIMRAL</i>	<i>10.500.000</i>	<i>10.462.059</i>	<i>-37.941</i>	<i>99,64</i>
1.2.	<i>Penyusunan RKPD</i>	<i>185.950.000</i>	<i>175.751.250</i>	<i>-10.198.750</i>	<i>94,52</i>
1.3.	<i>Pelaksanaan Musrenbang RKPD</i>	<i>225.059.600</i>	<i>223.371.100</i>	<i>-1.688.500</i>	<i>99,25</i>
2.	Penyusunan KUA dan PPAS	234.718.000	212.515.800	-22.202.200	90,54
2.1.	<i>Penyusunan KUA dan PPAS</i>	<i>231.718.000</i>	<i>212.515.800</i>	<i>-19.202.200</i>	<i>91,71</i>
2.2.	<i>Pelaksanaan Pokja Verifikasi Kegiatan</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>0</i>
3.	Penyusunan RPJMD	357.145.500	319.674.250	-37.471.250	89,51
V	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	233.112.000	198.570.000	-34.542.000	85,18
1.	Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan SDA	43.891.000	37.327.000	-6.564.000	85,04
2.	Perencanaan pembangunan industri perdagangan dan koperasi	119.282.000	112.230.500	-7.051.500	94,09
2.1.	<i>Analisis Alternatif Pendanaan Non APBD</i>	<i>78.981.000</i>	<i>78.153.500</i>	<i>-827.500</i>	<i>98,95</i>
2.2.	<i>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan dan Koperasi</i>	<i>40.301.000</i>	<i>34.077.000</i>	<i>-6.224.000</i>	<i>84,56</i>
3.	Pendampingan Anti Poverty Program (APP)	57.965.000	37.114.500	-20.850.500	64,03
4.	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	11.974.000	11.898.000	-76.000	99,37
4.1.	<i>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam</i>	<i>6.541.000</i>	<i>6.497.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>99,33</i>
4.2.	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	<i>5.433.000</i>	<i>5.401.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>99,41</i>
VI	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	437.069.700	417.039.650	-20.030.050	95,42
1.	Perencanaan pembangunan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan	130.489.500	128.689.600	-1.799.900	98,62
2.	Fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	21.887.000	18.091.000	-3.796.000	82,66
3.	Perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	152.085.000	142.320.850	-9.764.150	93,58
4.	Perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan	132.608.200	127.938.200	-4.670.000	96,48





NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
VI	Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah	1.565.857.200	1.497.072.539	-68.784.661	95,61
1.	Perencanaan pembangunan PU dan Perhubungan	20.570.400	20.466.500	-103.900	99,49
2.	Perencanaan pembangunan PRKP dan Cipta Karya	851.054.300	805.337.790	-45.716.510	94,63
2.1.	<i>Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)</i>	<i>39.422.500</i>	<i>33.414.500</i>	<i>-6.008.000</i>	<i>84,76</i>
2.2.	<i>Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)</i>	<i>62.200.000</i>	<i>55.763.000</i>	<i>-6.437.000</i>	<i>89,65</i>
2.3.	<i>Koordinasi Perencanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)</i>	<i>90.757.200</i>	<i>89.100.000</i>	<i>-1.657.200</i>	<i>98,17</i>
2.4.	<i>Identifikasi dan Penataan Kawasan Permukiman Wilayah Pesisir</i>	<i>101.511.000</i>	<i>100.544.290</i>	<i>-966.710</i>	<i>99,05</i>
2.5.	<i>Identifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kabupaten Sumenep</i>	<i>153.810.000</i>	<i>133.019.000</i>	<i>-20.791.000</i>	<i>86,48</i>
2.6.	<i>Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)</i>	<i>403.353.600</i>	<i>393.497.000</i>	<i>-9.856.600</i>	<i>97,56</i>
3.	Perencanaan Tata Ruang dan LH	694.232.500	671.268.249	-22.964.251	96,69
3.1.	<i>Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup</i>	<i>38.537.900</i>	<i>36.791.000</i>	<i>-1.746.900</i>	<i>95,47</i>
3.2.	<i>Penyusunan Perda Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</i>	<i>153.212.100</i>	<i>148.065.000</i>	<i>-5.147.100</i>	<i>96,64</i>
3.3.	<i>Kajian Perencanaan Kota Baru Kecamatan Batuan</i>	<i>502.482.500</i>	<i>486.412.249</i>	<i>-16.070.251</i>	<i>96,8</i>
VII	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan	118.447.000	116.762.500	-1.684.500	98,58
1.	Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan	80.075.000	78.763.000	-1.312.000	98,36
1.2.	<i>Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Sarana Infrastruktur Air Bersih Wilayah Kepulauan Kab. Sumenep</i>	<i>80.075.000</i>	<i>78.763.000</i>	<i>-1.312.000</i>	<i>98,36</i>
2.	Penyusunan profil wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep	38.372.000	37.999.500	-372.500	99,03
2.1.	<i>Penyusunan Profil Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep</i>	<i>38.372.000</i>	<i>37.999.500</i>	<i>-372.500</i>	<i>99,03</i>
VIII	Program Pengembangan data/informasi dan Pelaporan	136.465.000	127.465.579	-8.999.421	93,41





NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.	Pengendalian Pembangunan Daerah	58.293.000	55.250.308	-3.042.692	94,78
1.1.	<i>Sinkronisasi dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial</i>	4.130.500	3.186.130	-944.370	77,14
1.2.	<i>Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan DAK</i>	49.012.500	48.537.178	-475.322	99,03
1.3.	<i>Pengendalian Pembangunan Daerah</i>	5.150.000	3.527.000	-1.623.000	68,49
2.	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	78.172.000	72.215.271	-5.956.729	92,38
2.1.	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah</i>	14.270.000	10.352.000	-3.918.000	72,54
2.2.	<i>Analisa Data Hasil Pembangunan Daerah (SIPD)</i>	7.766.500	5.763.771	-2.002.729	74,21
2.3.	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban</i>	56.135.500	56.099.500	-36.000	99,94
IX	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	327.034.664	310.487.664	-16.547.000	94,94
1.	Penyusunan penelitian Daerah	23.533.664	21.975.664	-1.558.000	93,38
1.1.	<i>Penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi (Inotek) Kabupaten Sumenep</i>	777.000	777.000	0	100
1.2.	<i>Pengkajian, Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Dengan Berbasis IPTEK</i>	7.030.664	7.030.664	0	100
1.3.	<i>Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)</i>	15.726.000	14.168.000	-1.558.000	90,09
2	Pengembangan Penelitian Daerah	303.501.000	288.512.000	-14.989.000	95,06
2.1.	<i>Pengkajian, Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</i>	248.992.000	246.902.000	-2.090.000	99,16
2.2.	<i>Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Hasil-hasil Kajian</i>	39.308.000	29.605.000	-9.703.000	75,32
2.3.	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kajian</i>	15.201.000	12.005.000	-3.196.000	78,98
TOTAL		5.071.815.164	4.749.402.015	-322.413.149	93,64





BAB IV

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan”, dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebesar 65%
 - Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebesar 80%
 - Persentase OPD dengan Capaian Program Baik, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebesar 80%
2. Untuk analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan”, dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebesar 50%
3. Realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu rata-rata sebesar 100%, dengan efisiensi anggaran sebesar 6,42%





4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Sepanjang tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya dalam pencapaian target target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020.
4. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.



LAMPIRAN :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si**

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, Januari 2021

Pihak Kedua,
BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP**




Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	1.1. Bobot Perencanaan Kinerja 2.2. Bobot Pengukuran Kinerja	Bobot 26 Bobot 18,50	IKU IKU
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	2.1. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2.2. Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik 2.3. Persentase OPD dengan Capaian Program Baik	70% 85% 85%	IKU IKU IKU
3	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	3.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	50%	IKU

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.746.021.932	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.549.264.356	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.312.484.067	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 505.920.160	
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 1.139.838.996	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp. 12.253.529.511	

Sumenep, Januari 2021

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

**KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN SUMENEP**

Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660129 198903 1 007

PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN MENTERI DALAM NEGERI
TAHUN 2020 TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA TAHUN 2020



PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN MENTERI DALAM NEGERI
TAHUN 2020 TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA TAHUN 2020





The Soul of Madura
Sumenep

